

**STUDI ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI
TENTANG WAKAF OLEH ORANG *SAFIH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**LUKMAN ZEN
NIM. 2101107**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2008**

Drs. Taufik CH, M.Hum
Perum Griya Lestari Blok B7 No.8
Semarang
Rupi'i, M.Ag
Perum Griya Lestari B2 No. 2
Gondoriyo Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Lukman Zen

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lukman Zen

Nomor Induk : 2101107

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT MAZHAB
HANAFI TENTANG WAKAF BAGI
ORANG SAFIH**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Maret 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Taufik CH, M.H
NIP. . 150 263 036

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Prof. Dr. Hamka km.2 (Kampus III) Ngalian 50159 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lukman Zen

NIM : 2101107

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : AS

**Judul :STUDI ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI
TENTANG WAKAF OLEH ORANG *SAFIH***

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

10 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2007/2008

Semarang, Juni 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 150 263 253

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

Penguji I,

Penguji II,

H. Ahmad Izzudin, M.Ag
NIP. 150 290 930

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 150 318 016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Taufik CH, M.H
NIP. 150 263 036

Rupi'i, M.Ag
NIP. 150 285 611

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(آل عمران: 92)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S. Ali-Imran: 92).*

*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 91.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak Imam Khumsosi dan Ibu Siti Khotijah)** yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- **Kakak dan adikku Tercinta (Mbak Siti Khulasoh, Siti Fatimah dan Adik Siti Khomsiyati)** yang kusayangi yang selalu tak henti-hentinya memberi semangat dan motivasi dalam hidup ini terutama dalam menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini.
- **Calon pendamping hidup (Ani Winarni, SE)** yang selalu memberi semangat dalam menuntaskan studi dan skripsi.
- **Teman-Temanku (Jojon, Wahid), teman-teman di pondok al-Ma'rufiyah dan di Perum. Pasadena** dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam canda dan tawa selama menempuh asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Maret 2008

Lukman Zen
NIM: 2101107

ABSTRAK

Wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Yang menjadi masalah adalah apa latar belakang pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf oleh orang *safih*? Bagaimana *istinbat* hukum mazhab Hanafi tentang kebolehan wakaf oleh orang *safih*?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber utamanya yaitu *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* karya Abdurrahmân al-Jazirî. Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari kitab-kitab bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas wakaf oleh orang *safih*. Untuk menganalisis data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: metode hermeneutic menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya, metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang, historis yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi, seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya bila dia punya ahli waris. Dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus". Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: pertama, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; kedua, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal. Secara umum, *istinbat* hukum mazhab Hanafi yaitu (1) al-Qur'an; (2) Sunnah Rasulullah; (3) Fatwa-fatwa dari para sahabat; (4) Kias; (5) Istihsan; (6) Ijmak; (7) Urf. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan wakaf oleh orang *safih* yaitu (a) Sumber/dalil pokok adalah firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. (b) *Qiyas*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“STUDI ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG WAKAF OLEH ORANG *SAFIH*”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Taufik CH, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rupi’i, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Tolkah, M.A selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Ibuku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya	15
B. Syarat dan Rukun Wakaf	20
C. Macam-Macam Wakaf	28
D. Manfaat Wakaf	32

BAB III : PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG WAKAF OLEH ORANG *SAFIH*

A. Biografi Mazhab Hanafi	37
B. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang <i>Safih</i> ...	41

C. <i>Istinbat</i> Hukum Mazhab Hanafi	45
--	----

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG WAKAF OLEH ORANG *SAFIH*

A. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang <i>Safih</i>	55
B. <i>Istinbat</i> Hukum Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang <i>Safih</i>	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
C. Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang persoalan wakaf merupakan issue yang menarik. Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtimaiyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.¹

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).² Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.³ Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁴

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam *Fiqh Islam*, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya

¹Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hlm. 1

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 307. Lihat juga Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 87.

³Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., hlm. 319.

⁴Sayyid Sabiq, *loc. cit.*,

tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.⁵ Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun. Rukun wakaf ada 4 yaitu:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)
2. *Maukuf* (barang/harta yang diwakafkan)
3. *Maukuf 'Alaih* (tujuan wakaf/orang yang disertai untuk mengurus harta wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).⁶

Di antara sekian banyak ajaran Islam ada yang mengandung nilai ibadah saja, ada yang mengandung nilai sosial saja dan ada pula yang mengandung kedua-duanya. Salah satu ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan juga sosial adalah ajaran tentang wakaf. Dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu motivasi wakaf adalah *taqarrub* kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali-Imran: ayat 92:

⁵Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.

⁶Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994, hlm. 17. Lihat juga Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 84 – 85

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali-Imran: ayat 92).⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan umatnya agar suka berderma atau menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau sarana-sarana lain karena pahalanya dapat terus menerus mengalir selama benda wakaf itu masih ada serta dapat diambil manfaatnya. Sebagaimana diterangkan oleh hadis :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ جَارِيَةً أَوْ عِلْمًا يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)⁸

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang rukun wakaf, maka syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan

⁷DEPAG RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989, hlm. 91.

⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, Juz III, hlm. 73.

terpaksa atau dipaksa, dan mencapai umur baligh dan *wakif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik benang merah yang mengarah pada kesimpulan, bahwa wakaf dilakukan oleh orang, badan hukum. Jika dilakukan oleh orang ia harus mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya bahwa ia dalam keadaan sehat akalnya dan dalam keadaan sadar. Berbeda dengan penjelasan tersebut, mazhab Hanafi mengatakan: orang *safih* boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya, dengan syarat wasiat tersebut untuk sesuatu kebaikan, baik dalam bentuk wakaf maupun lainnya.⁹

Abdurrahmân al-Jazirî, dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, mencantumkan pendapat mazhab Hanafi sebagai berikut :

ويصح أن يوصي السفیه من ماله بالثلث إن كان له وارث بشرط أن يوصی
بالإنفاق على عمل خيري كالإنفاق على الفقراء والمساكين أو بناء مصح
أو قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك أما إذا أوصی بملعب أو ناد أو نحو ذلك فإن
وصيته تكون باطلة ولا تنفذ¹⁰

Artinya: "Seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya bila dia punya ahli waris. Dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus".

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 644.

¹⁰Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz II, hlm. 291.

Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: pertama, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; kedua, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal.

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis hendak meneliti pendapat mazhab Hanafi tentang kebolehan seorang *safih* (idiot) yang dapat melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah amaliah, yaitu seorang idiot dapat melakukan wakaf dengan sepertiga harta yang dimilikinya. Tentunya ini menjadi persoalan yang perlu dikaji.¹¹

Berpijak dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul ”*Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih*”.

¹¹Para ulama fiqh menyatakan bahwa termasuk kepada *safih* (orang bodoh dan dungu) adalah orang yang kebiasaannya menghambur-hamburkan hartanya tanpa tujuan yang diridai syara', seperti membelanjakan hartanya untuk membeli khamar, untuk berjudi, atau pedagang yang tidak mengerti cara berdagang sehingga sering ditipu orang, atau orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk kepuasan nafsu seksualnya. Orang-orang seperti ini, demi kemaslahatan hartanya, menurut jumhur ulama, harus dikenakan hukum al-hijr, melalui ketetapan hakim. Dengan demikian syarat seseorang dinyatakan *safih* yaitu 1) dungu/bodoh/idiot; 2) boros atau menghambur-hamburkan harta. Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 207.

B. Perumusan masalah

Dari keterangan di atas dapat dirumuskan rumusan masalah, di antaranya:

- 1). Apa latar belakang pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf oleh orang *safih*?
- 2). Bagaimana *istinbat* hukum mazhab Hanafi tentang kebolehan wakaf oleh orang *safih* ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1). Untuk mengetahui latar belakang pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf oleh orang *safih*.
- 2). Untuk mengetahui *istinbat* hukum mazhab Hanafi tentang kebolehan wakaf oleh orang *safih*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian di perpustakaan Fakultas Syari'ah ditemukan beberapa skripsi yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Akhmad Saekhudin (NIM: 2102290) dengan judul: *Pendapat Imam Syafi'i tentang Ijab dan Qabul sebagai Syarat Sahnya Wakaf*. Pada intinya penyusun skripsi ini mengambil kesimpulan bahwa menurut Syafi'i, untuk sempurnanya wakaf perlu adanya ijab dan kabul.

Bila akad wakaf hanya dengan ijab tanpa kabul maka wakaf yang demikian tidak sah. Berbeda halnya dengan pemberian berupa hibah dan wasiat sudah sempurna dengan hanya berupa perkataan dari yang memberi (ijab), sedangkan dalam wakaf, baru dinyatakan sempurna bila dipenuhi dengan dua peristiwa yaitu ijab dan kabul.

Dalil al-Syafi'i tentang ijab kabul dalam wakaf yaitu *pertama*, qiyas. Al-Syafi'i menganalogikan (mengqiyaskan) wakaf dengan akad jual beli yang mengharuskan sahnya jual beli dengan ijab kabul. *Kedua*, karena al-Syafi'i menyamakan wakaf dengan akad jual beli maka ia menggunakan hadis sebagai dalil hukum atas pendapatnya yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Hisyam Ya'ni al-Dastuwayy dari Yahya bin Abi Katsir dari Seorang laki-laki Sesungguhnya Yusuf bin Mahak telah mengabarkan kepadanya sesungguhnya Abdullah bin 'Asmat dari Hakim bin Hizam berkata: Wahai Rasulullah, aku membeli barang-barang, maka manakah yang halal bagiku darinya dan manapula yang haram? Rasulullah Saw menjawab: Wahai anak saudaraku, jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau menjualnya hingga engkau menerimanya. (HR. Ahmad).

Menurut penyusun skripsi tersebut, bahwa karena metode *istinbat* yang digunakan Syafi'i yaitu qiyas dan hadis, maka kedua dalil ini sangat kuat untuk dijadikan landasan hukum, karena dalam ushul fiqh, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, dan qiyas merupakan sumber hukum yang keempat sesudah al-Qur'an, hadis dan ijma.

Skripsi yang disusun oleh Mamik Sunarti (NIM: 2101330) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Kauman Semarang)*. Dalam kesimpulannya ditegaskan bahwa pemberdayaan harta wakaf Masjid Agung Semarang jauh dari kata ideal. Pemberdayaan masih dalam lingkup usaha yang terbatas seperti hanya dalam bentuk pemberdayaan SPBU, pembangunan pertokoan yang berlokasi di belakang Masjid Agung Semarang, dan penyewaan perkantoran. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf belum sesuai dengan harapan.

Untuk membangun atau mengarahkan harta wakaf menjadi lebih bermanfaat, ada hambatan yang cukup berarti karena menyangkut kemampuan para pengelola harta wakaf. Sehingga ada kesan bahwa para pengelola harta wakaf masih lemah dalam aspek sumber daya manusia (SDM). Dalam kaitannya dengan hukum Islam, apabila harta wakaf sudah tidak memberikan manfa'at lagi, bolehkah benda wakaf itu ditukar dengan maksud diberdayakan menjadi produktif? Asy Syafi'i sendiri dalam masalah tukar menukar harta wakaf hampir sama dengan Imam Malik, yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Tapi golongan Syafi'i berbeda pendapat tentang harta wakaf yang berupa barang tak bergerak yang tidak memberi manfaat sama sekali: (1) sebagian menyatakan boleh di tukar agar harta wakaf itu ada manfaatnya; (2) sebagian menolaknya. Dengan demikian dalam perspektif golongan Syafi'i, bahwa secara hukum pendapat yang

pertama membolehkan menukar, mengganti, merubah penggunaan dan peruntukan benda wakaf. Sedangkan pendapat golongan yang kedua dari golongan Syafi'i tidak membolehkannya dan harus sesuai dengan isi pesan *wakif*.

Skripsi yang disusun oleh Amalia Sholikhah (NIM: 2101244) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Tentang Sengketa Tanah Wakaf dan Hibah Aset Yayasan al-Amin Kab. Blora*. Pada intinya penyusun skripsi ini mengambil kesimpulan bahwa Status kepemilikan tanah wakaf dan hibah aset Yayasan al-Amin Kab. Blora berada dalam sengketa yang berkepanjangan antara keluarga almarhum pemberi wakaf dan hibah dengan yayasan. Atas dasar ini maka ditinjau dari hukum Islam (fiqih muamalah) status kepemilikan tanah wakaf aset Yayasan al-Amin Kabupaten Blora termasuk *milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) karena pada prinsipnya, wakaf termasuk kategori *milk naqish*. Di samping itu keluarga almarhum pemberi wakaf juga berpendapat bahwa yayasan hanya memiliki hak memiliki benda itu akibat tidak dipenuhinya syarat *al-aqd*.

Cara pemanfaatan tanah wakaf dan hibah di Yayasan al-Amin Kabupaten Blora belum didayagunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (a) tanah masih dipersengketakan; (b) ada pemahaman di masyarakat bahwa tanah wakaf itu tidak boleh dialih fungsikan. Pemahaman ini dipengaruhi oleh adanya pendapat mazhab Syafi'i yang tidak boleh mengalih fungsikan tanah wakaf.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian yang pertama, kedua dan ketiga belum menyentuh pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan penelitian ini secara khusus membahas tentang kebolehan wakaf bagi orang safih.

E. Metode Penelitian

1). Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹² Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

2). Sumber Data

Sumber data¹³ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut,

¹²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹³Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

yaitu *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah* karya Abdurrrahmân al-Jazirî.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari kitab-kitab bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas wakaf oleh orang *safih*.

3). Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Hermeneutic

Metode ini menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.¹⁴ Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Aplikasinya *hermeneutika* sebagaimana dinyatakan Syahrin Harahap yaitu hermeneutika dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Pertama, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Kedua,

¹⁴Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996, hlm. 14. Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm. 140 – 141

mengukur seberapa jauh dicampur subyektifitas terhadap interpretasi objektif yang diharapkan, dan ketiga menjernihkan pengertian.¹⁵

Beberapa kajian menyebut bahwa hermeneutika adalah "proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti". Definisi ini agaknya definisi yang umum, karena jika melihat terminologinya, kata hermeneutika ini bisa diderivasikan ke dalam tiga pengertian: pertama, Pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir. Kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang makna-nya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. Ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.¹⁶

Menurut Richard E. Palmer, hermeneutik mencakup dalam dua fokus perhatian yang berbeda dan saling berinteraksi yaitu (1) peristiwa pemahaman teks, dan (2) persoalan yang lebih mengarah mengenai apa pemahaman dan interpretasi itu. Dengan demikian interpretasi dapat mengacu kepada tiga persoalan yang berbeda: pengucapan lisan, penjelasan yang masuk akal, dan transliterasi dari bahasa lain, baik dalam penggunaan bahasa Yunani maupun

¹⁵Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006, hlm. 61.

¹⁶Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003, hlm. 5.

Inggrisnya. Bahkan secara sederhana perkataan, pernyataan, atau penegasan merupakan bentuk penting dari "interpretasi".¹⁷

b. Metode Deskriptif Analitis

Yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.¹⁸

Skripsi ini merupakan kajian terhadap pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf oleh orang *safih*.

c. Historis

Yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah.¹⁹ Penelitian historis, bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal

¹⁷Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005, hlm. 8, 16, 17.

¹⁸Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

¹⁹Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986, hlm. 16.

mendatang.²⁰ Aplikasi metode ini dengan menyelidiki secara kritis latar belakang socio-kultural mazhab Hanafi.

F. Sistematika penulisan

Sistematika ini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan, sehingga dapat memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang akan dibahas. Maka disusun sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah masalah, hipotesis, metodologi penelitian, sistematika penulisan

Bab II adalah tinjauan umum tentang wakaf yang berisi tentang pengertian wakaf dan dasar hukumnya, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, manfaat wakaf.

Bab III adalah pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf oleh orang *safih* yang berisi tentang biografi mazhab Hanafi, *istinbat* hukum mazhab Hanafi, pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf oleh orang *safih*

Bab IV adalah analisis pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf oleh orang *safih* yang berisi tentang analisis pendapat mazhab Hanafi tentang wakaf bagi orang *safih*, *istinbat* hukum mazhab Hanafi tentang wakaf oleh orang *safih*

²⁰Mardalis, *op.cit.*, hlm. 25.

Bab V sebagai bab terakhir adalah penutup yang berisi tentang saran-saran, kesimpulan dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

Kata *waqaf* digunakan dalam al-Qur'an empat kali dalam tiga surat yaitu QS. Al-An'am, 6: 27, 30, Saba', 34: 31, dan al-Saffat, 37 : 24. Ketiga yang pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan, "Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya". Konteks ayat ini menyatakan proses ahli neraka ketika akan dimasukkan neraka.¹

Wakaf yang bentuk *jama'*-nya *auqâf* berasal dari kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) atau kata kerja intransitif (*fi'il lazim*), berarti menahan atau menghentikan sesuatu dan berdiam di tempat.² Dengan kata lain, perkataan *waqf* yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab: *waqafa* – *yaqifu* – *waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.³ Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *masdar* dari *habasa* – *yahbisu* – *habsan*, artinya menahan.⁴

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 481.

²Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 120.

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1576.

⁴Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 490.

Pengertian di atas tidak berbeda dengan Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan.⁵ Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitab *Minhâj al-Muslim*, bahwa menurut bahasanya, "wakaf" berarti menahan.⁶

Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁷ Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan untuk umum atau khusus.⁸ Sejalan dengan itu Maulana Muhammad Ali merumuskan wakaf sebagai penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.⁹

Menurut Sayyid Sabiq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁰ Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 307.

⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhâj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 2004, hlm. 343.

⁷Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 319.

⁸Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000, hlm. 52.

⁹Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976, hlm. 467.

¹⁰Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 307.

menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹¹ Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.¹² Sedangkan menurut Al-Shan'ani, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.¹³

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam Fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.¹⁴

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau/kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁵ Dalam butir 1 pasal 215 KHI (INPRES No. 1/1991), disebutkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

¹¹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 635

¹²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 233

¹³Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 87.

¹⁴Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.

¹⁵Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005, hlm. 2.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt.

Adapun dasar yuridis wakaf dapat dilihat dalam al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Baqarah, 2: 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ {267}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".¹⁷

Surat al-Baqarah, 2: 261,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {261}

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat

¹⁶Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 139

¹⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 67.

gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui".¹⁸

Surat Ali-Imran, 3: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
(آل عمران: 92)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S. Ali-Imran: 92).¹⁹

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.²⁰ Itulah sebabnya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan surat Ali-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi Saw dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.²¹

Adapun salah satu hadis yang berbicara tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf yaitu:

Rasulullah Saw bersabda:

¹⁸Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 65.

¹⁹*Ibid*, hlm. 91

²⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 81.

²¹Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta:PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 8

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مَنْ صَدَقَ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)²²

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

B. Syarat dan Rukun Wakaf

Untuk memperjelas syarat dan rukun wakaf maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²³ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan

²²Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 73.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

dilakukan."²⁴ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁵ melazimkan sesuatu.²⁶

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁷ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁸ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁹ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁰

²⁴*Ibid.*, hlm. 1114.

²⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²⁶Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁸Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

²⁹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

Adapun unsur (rukun) *wakaf* dan syarat yang menyertainya adalah sebagai berikut:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan).

Syarat *wakif* adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.³¹ *Wakif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.³² Karena itu tanah *wakaf*, hanya bisa dilakukan jika tanah itu milik sempurna (*milik al-tam*) si *wakif*. Dalam versi pasal 215 (2) KHI jo. pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan: "*Wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya".

Adapun syarat-syarat *wakif* adalah:

- (1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP 28/1977).

Sebagai ibadah *tabarru'*, *wakaf* memang tidak mengharuskan adanya *qabul*.³³ Ini harus dipahami bahwa dalam pelaksanaannya, *wakaf*

³¹ Abi Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm.

³² Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 85.

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, *op. cit.*, hlm. 322.

perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum *wakaf* mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat *muamalah* dalam QS. al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan *wakaf*.³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri

³⁴Muhammad Daud Ali, *op. cit*, hlm. 85.

tidak mampu mengimlakkan, maka hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah, 2: 282).³⁵

2. *Mauquf* atau benda yang diwakafkan

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai;
- b. benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum;
- c. hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikannya;
- d. benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya;
- e. benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar;

³⁵Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 70.

- f. benda wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.³⁶

3. *Mauquf 'alaih* (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan *wakaf*, maka *wakif* perlu menegaskan tujuan *wakafnya*. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai *wakaf* keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairy*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.³⁷ Kegunaan *wakaf* bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

Karena itu, *wakaf* tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang memungkinkan untuk tujuan maksiat. Menurut Abu Yahya Zakariya, menyerahkan *wakaf* kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.³⁸

Faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan tujuan dan manfaat *wakaf* itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik untuk mewakafkan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, mengakibatkan tujuan *wakaf* menjadi terabaikan. Jika tertib administrasi ini ditempatkan sebagai *wasilah* (instrumen) hukum, maka hukumnya bisa

³⁶Jika benda wakaf dapat seenaknya diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan maka hal ini akan membuat tidak percaya lagi bagi masyarakat dan khususnya pemberi wasiat.

³⁷Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 323

³⁸*Ibid*, hlm. 324.

menjadi wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang diformulasikan para ulama "*li al-wasail hukm al-maqashid*" artinya "(hukum) bagi perantara, adalah hukum apa yang menjadi tujuannya".³⁹

4. *Sighat* (Ikrar atau Pernyataan *Wakaf*)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk *mewakafkan* tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. ps. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar *wakaf* ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku *mewakafkan*" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *wakif*, dan harta *wakaf* menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan *wakaf* itu sendiri.⁴⁰ Karena itu, konsekuensinya, harta *wakaf* tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan.

Secara teknis, ikrar *wakaf* diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo, pasal 218 KHI: (1). Pihak yang *mewakafkan* tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar *Wakaf* (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Aktra Ikrar *Wakaf* (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud

³⁹*Ibid.*, hlm. 324.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 497

dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁴¹

5. *Nadzir* (Pengelola) *Wakaf*

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun *wakaf*. Boleh jadi karena *wakaf* adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan *wakaf*. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan *wakaf* yang dilakukannya. Bahkan hemat saya, mempublikasikan tindakan sedekah termasuk di dalamnya *wakaf* adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.⁴²

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah, ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 271)

Artinya: Jika kamu menampakkan maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 271).⁴³

Pada masa 'Umar ibn al-Khaththab ra mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi nadzirnya. Sepeninggalnya, pengelolaan *wakaf*

⁴¹Saekan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 139

⁴²Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, op.cit., hlm. 325.

⁴³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., hlm. 68.

diserahkan kepada putrinya Hafshah, dan setelah itu ditangani Abdullah ibn 'Umar, kemudian keluarganya yang lain.⁴⁴

Boleh jadi "sunnah" awal demikian, berikutnya tentang *nadzir* ini tidak ditempatkan sebagai salah satu rukun *wakaf*. Karena posisi *nadzir* sangat penting dan strategis sebagai bagian tak terpisahkan bagi keberhasilan *wakaf* dan realisasi pengelolaan harta *wakaf*. Oleh karena itu, untuk menjadi *nadzir*, seseorang harus memiliki persyaratan dan kualifikasi tertentu, agar dia bisa mengemban amanat itu dengan sebaik-baiknya.⁴⁵

Integritas kepribadian *nadzir* ini menjadi sangat penting, termasuk ketika *nadzir* yang pertama sudah "purna tugas" maka penggantinya sedapat mungkin memiliki kepribadian yang amanah. Atau supaya amanahnya tetap terjaga, *nadzir*, sebaiknya dilaksanakan *nadzir* secara kolektif.

C. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Wakaf ahli: wakaf yang ditujukan untuk anak cucu atau kaum kerabat, kemudian sesudah mereka itu ditujukan untuk orang-orang fakir. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.⁴⁶

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 326.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 307.

satu segi wakaf *ahli/dzurri* ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari *silatur rahimnya*.⁴⁷ Rasulullah SAW pernah memberi saran kepada Abu Thalhah agar wakafnya diberikan kepada ahli kerabat, seperti hadis riwayat Muslim di bawah ini.

عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ يَبْرَحِي وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ يَبْرَحِي وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذَخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ ذَلِكَ مَالٍ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٍ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رواه مسلم)

48

Artinya: Bersumber dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, beliau mendengar Anas bin Malik berkata: "Dulu, Abu Thalhah adalah seorang shahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Medinah. Dan harta yang paling dia sukai adalah kebun Bairaha yang menghadap ke mesjid. Rasulullah saw. biasa masuk ke kebun itu untuk minum airnya yang tawar. Ketika turun ayat berikut: "Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang

⁴⁷Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT Garoeda Buana, 1992, hlm. 3.

⁴⁸Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Juz. II, *op.cit.*, hlm. 79.

kalian cintai..." (Ali Imran, ayat 92), Abu Thalhah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Allah telah berfirman dalam KitabNya. Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai, sedangkan harta yang paling kucintai adalah kebun Bairaha, maka kebun itu kusedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya (pahalanya nanti di akherat) di sisi Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah kebun itu, ya Rasulullah, sekehendakmu." Rasulullah saw. bersabda: "Bagus itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai kebun itu. Dan aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada para kerabatmu." Abu Thalhah pun membagi kebun itu dan memberikan kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya. (HR. Muslim)

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam *sighat* wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu.⁴⁹

Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Contohnya ialah A mewakafkan sebidang tanahnya kepada keluarga B. Pada suatu saat kemudian dari keluarga B punah, tidak seorangpun yang tinggal,

⁴⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 199.

maka harta wakaf itu dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah.⁵⁰

Hal ini difahamkan dari hadis Ibnu Umar bahwa bila harta telah diwakafkan berarti itu telah diserahkan kepada Allah Swt. Sedangkan manfaat harta wakaf itu boleh digunakan untuk karib kerabat, untuk jalan Allah, untuk fakir miskin dan sebagainya. Bila karib kerabat atau orang tertentu tidak ada lagi tentulah harta wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain sesuai dengan yang telah ditentukan Allah. Sekalipun agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi negara-negara Islam, seperti Mesir, Syiria dan negara-negara lain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No. 180 tahun 1952, sedang Syiria telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf ahli di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.⁵¹

2. Wakaf *Khairi*: wakaf yang diperuntukkan kebaikan semata-mata.⁵²

Dengan kata lain wakaf *khairi* merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 199

⁵¹*Ibid.*, hlm. 200.

⁵²Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 307.

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/kelompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf *khairi*, si *wakif* dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan.⁵³ Seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya. Bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.⁵⁴

D. Manfaat Wakaf

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Sebagian orang miskin tidak mampu untuk mencari nafkah dikarenakan lemahnya kekuatan

⁵³Faishal Haq dan Saiful Anam, *op. cit.*, hlm. 6 – 7.

⁵⁴Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 91 – 92.

yang mereka miliki, yang disebabkan karena sakit atau yang lainnya, seperti halnya para wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana para lelaki. Sebagian lagi termasuk mereka yang lemah karena ditelan oleh masa (telah berusia lanjut) atau orang-orang yang tertimpa kefakiran yang termasuk dalam golongan mereka yang berhak mendapatkan zakat, seperti orang yang dulunya kaya dan berpangkat kemudian menjadi jatuh miskin.

Mereka adalah orang-orang yang sangat berhak mendapatkan cinta dan belas kasihan. Apabila diwakafkan kepada mereka sejumlah harta atau sedekah, maka hal itu akan sangat membantu mereka untuk bisa terlepas dari belenggu kemiskinan, sehingga beban kehidupan mereka akan menjadi lebih ringan. Orang yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan pahala dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Nya, yaitu di hari di mana amal perbuatan ditimbang.⁵⁵

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.⁵⁶ Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna

⁵⁵Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980, hlm. 131.

⁵⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 103

diberikan untuk jalan kebaikan.⁵⁷ Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

- a Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

- b Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.⁵⁸

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, maka Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.⁵⁹

Menurut Didin Hafidhuddin, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 240

⁵⁸Masjful Zuhdi, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988, hlm. 77-79.

⁵⁹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 308.

dan tanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.⁶⁰

Dalam kaitan dengan hikmah dan manfaat wakaf, A.A. Mannan yang dikutip Didin Hafidhuddin menulis bahwa sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.⁶¹

Kenyataan menunjukkan institusi wakaf telah menjalankan sebagian dan tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial. Ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan bahwa sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk jasa-jasa fotokopi, pusat seni, dan lain-lain.⁶²

⁶⁰Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 124.

⁶¹*Ibid*

⁶²*Ibid.*, hlm. 123.

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan dan pendidikan seperti: pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan serta kimia. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, tetapi juga obat-obatan untuk hewan.

Manusia dapat mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang dibangun dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya diberikan di sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi juga telah diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas seperti universitas Al-Azhar Kairo (Mesir) yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pada abad ke-4 Hijriyah, rumah sakit anak yang didirikan di Istanbul (Turki) dananya berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf.⁶³

Pada periode Abbasiyah, dana hasil penyusunan pengelolaan aset wakaf juga digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan telah sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam, terutama arsitektur dalam bangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.⁶⁴

⁶³*Ibid*, hlm. 124.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 124.

BAB III
PENDAPAT MAZHAB HANAFAI TENTANG
WAKAF OLEH ORANG *SAFIH*

A. Biografi Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Abu Hanifah. Dengan kata lain, Mazhab Hanafi adalah aliran fikih yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan *rakyu* (rasio/hasil pikiran manusia), karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran *rakyu*. Selain itu, Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).¹

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Saat itu Irak adalah tempat pengembangan fikih aliran *rakyu* yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas'ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin al-Khattab untuk menjadi guru dan qadi di Kufah, Irak, dengan membawa paham fikih Umar. Umar bin al-Khattab (42 SH/581 M-23 H/644 M) terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam, yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadis secara rasional.²

¹ Abdul Aziz Dahlan, et. al, (*editor*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 511.

² *Ibid.*,

Di daerah baru tersebut, permasalahan yang akan dijawab lebih beragam dibandingkan dengan di Madinah. Untuk itu Ibnu Mas'ud didesak supaya berijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Ibnu Mas'ud terkenal banyak melakukan qiyas dalam memecahkan berbagai masalah. Karena itu, pemahaman qiyasnya menjadi cikal bakal dari aliran *rakyyu* di Irak. Sewaktu menjadi guru, ia sempat membentuk kader-kader dari kalangan tabiin yang akan melestarikan paham fikihnya, termasuk seorang tokoh bernama Al-Qamah bin Qais an-Nakha'i (w. 62 H). Selanjutnya aliran fikih ini diwariskan kepada Ibrahim an-Nakha'i (w. 76 H), dan kemudian kepada Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Dari Imam Hammad inilah Imam Abu Hanifah berguru sehingga ia menjadi alim.³

Seperti diriwayatkan Ahmad asy-Syurbasi (ahli sejarah Mazhab-Mazhab fikih berkebangsaan Mesir), Imam Abu Hanifah belajar fikih sampai berumur 40 tahun, yaitu sampai guru yang dikaguminya itu wafat. Ilmu yang didapatkannya membuat Imam Abu Hanifah mampu secara mandiri melakukan ijtihad tanpa peduli apakah hasil ijtihadnya sama dengan pendapat gurunya atau berbeda. Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil menggantikan Imam Hammad mengajar di *halaqah* pada sebuah masjid di Kufah. Lewat *halaqah* pengajiannya ini, Imam Abu Hanifah banyak

³Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 180.

mengemukakan fatwa-fatwa fikihnya yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi.⁴

Mazhab Hanafi memiliki beberapa ciri sebagai berikut, *pertama*, fikih Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada fikih muamalah; Kemungkinan corak ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Imam Abu Hanifah sebagai pedagang pakaian di kota Kufah. Baginya, yang menjadi patokan dalam merumuskan hukum bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, kesimpulan qiyas bisa ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil qiyas berlawanan dengan '*urf*' yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum fikih Mazhab Hanafi.⁵

Kedua, fikih Imam Abu Hanifah memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik pria maupun wanita. Umpamanya, menurut Imam Abu Hanifah seorang wanita yang telah balig dan berakal berhak untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti adanya dua orang saksi dan syarat-syarat lainnya. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan adanya wali dan tidak sah hukumnya jika seorang perempuan menikahkan dirinya dengan seorang pria meskipun telah balig dan berakal. Contoh lain,

⁴Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 25.

⁵Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, "Seratus Muslim Terkemuka", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 96.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjadi hakim tidak khusus hak kaum pria, tetapi juga bagi wanita yang mencukupi syarat-syaratnya.⁶

Selain itu menurutnya harta yang telah diwakafkan bukan berarti telah keluar dari hak milik *wakif* yang mewakafkan. Sewaktu-waktu dikehendaki boleh ditariknya kembali, kecuali jika berupa masjid tanah pekuburan, atau telah diikrarkan tidak akan ditarik kembali di muka hakim. Contoh lainnya, bagi seseorang yang tidak bisa membelanjakan hartanya tidak boleh diadakan pengampuan terhadap dirinya, karena setiap orang mempunyai kewenangan atas hak miliknya yang tidak boleh dibatasi dan tidak pula boleh diganggu oleh siapa pun juga.⁷

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang pejabat hanya mempunyai kewenangan atas nama pribadi dalam batas hak miliknya sendiri. Oleh sebab itu setiap orang yang akan diangkat menjadi pejabat, harta kekayaannya harus didata lebih dahulu dan tidak boleh dicampuradukkan dengan harta negara.

Mazhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah, bahkan dalam beberapa periode menjadi Mazhab resmi negara, terutama pada masa dinasti Bani Abbas. Pada masa Pemerintah Turki Usmani (*Ottoman*), mazhab ini juga menjadi salah satu mazhab yang resmi di negara itu yang tertuang dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, semacam Undang-Undang Hukum Perdata yang disusun berdasarkan Mazhab Hanafi. Saat ini Mazhab Hanafi menjadi panutan sebagian besar umat Islam di India, Cina, dan beberapa negara di Timur Tengah (seperti Irak dan Suriah), serta sebagian umat Islam di Mesir

⁶*Ibid.*, hlm. 96.

⁷Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 181.

dan beberapa negara lainnya, terutama negara-negara Islam yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet, misalnya Uzbekistan.⁸

Beberapa kitab fikih standar dalam mempelajari Mazhab Hanafi sebagai sumber yang otentik di antaranya adalah kitab-kitab fikih hasil koleksi Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berjudul *Zahir al-Riwayah* (teks riwayat) Kitab ini terdiri atas 6 kitab *al-Mabsut* (buku yang terbentang), *al-Jami' as-Saghir* (himpunan ringkas), *al-Jami'al-Kabir* (himpunan lengkap), *al-Siyar as-Saghir* (sejarah ringkas), *al-Siyar al-Kabir* (sejarah lengkap), dan *al-Ziyadat* (tambahan). Di samping itu, beberapa kitab lainnya adalah *al-Mabsut*, karya Imam as-Sarakhsi (w. 483 H); *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, karya Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani (w. 587 H); *al-Inayah 'ala al-Hidayah*, karya Akmaluddin Muhammad bin Mas'ud (w. 786 H); *Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah*, karya Kamal bin al-Hummam (w. 861 H); dan *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* yang terkenal dengan judul *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, karya Ibn Abidin (w. 1252 H).⁹

B. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang *Safih*

الحنفية قالوا الحجر على السفية هو المفتى به في المذاهب وهو المختار كما تقدم
وتعريف السفية: هو الذي لا يحسن إدارة ماله فينفقه فيما لا يحل وفي البطالة
ويعمل فيه بالتبذير¹⁰

⁸Syekh M. Hassan al-Jamal, *Hayatu al-A'Immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, hlm. 26.

⁹Mahmud Syaltut, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, "Fiqh Tujuh Madzhab", Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 13.

¹⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Jilid II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 290.

Artinya: "Mazhab Hanafi berkata: Pengampuan atas orang bodoh yang pemboros adalah pendapat yang difatwakan dalam berbagai mazhab dan merupakan pendapat yang terpilih sebagaimana keterangan terdahulu. Definisi *safih* (orang bodoh) ialah: "orang-orang yang tidak bisa memutar hartanya untuk dikembangkan, maka dia membelanjakan hartanya untuk hal-hal kebatilan dan yang tidak halal dan ia membelanjakan dengan boros dan berlebihan".

Pemborosan dan berlebihan yang menyebabkan adanya pengampuan antara lain:

1. Menyerahkan harta kepada para penyanyi dan pemain.
2. Membeli burung merpati atau ayam jago dengan harga yang amat mahal karena "*ghayah* (kegemaran)".
3. Mempergunakan hartanya untuk main taruhan, judi dan lain sebagainya, yang tidak dikehendaki oleh syara' dan akal.¹¹

وكذلك إذا أنفق ماله في عمل من أعمال الخير كبناء مدرسة أو مسجد أو مصح فإنه يعد سفيها ويحجر عليه لأن الله تعالى إنما كلف الإنسان بعمل الخير إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك بحيث لا ينفق ماله ويفلس من أجل عمل الخير¹²

Artinya: "Demikian pula bila dia menginfakkan hartanya dalam kebaikan secara berlebihan, seperti membangun madrasah, mendirikan masjid atau sanatorium (tempat memelihara kesehatan) maka dia dianggap *safih* (orang bodoh yang pemboros), yang dilarang membelanjakan hartanya. Karena Allah hanya membebani orang agar beramal baik bila kondisi keuangan memang memungkinkan demikian. Dalam arti dia tidak menafkahkan dalam kebaikan hingga menjadikan ia jatuh *failir*".

Orang bodoh yang pemboros menurut pendapat yang kuat (*rajih*) tidak dilarang membelanjakan hartanya, kecuali dengan keputusan hakim. Maka

¹¹*Ibid.*,

¹²*Ibid.*, hlm. 291.

tasharuf-nya sebelumnya adalah lulus dan sah. Apabila dia cerdas, maka kecerdasannya tidak tetap kecuali dengan keputusan hakim.¹³ Sesungguhnya perilaku pemborosan dia itu mewajibkan dia diampui dan kebaikan dia dalam memutar hartanya menyebabkan berakhirnya pengampuannya tanpa menunggu pertimbangan dari hakim.

Menurut Abu Hanifah dan Segolongan fuqaha Irak, pengampuan atas orang-orang dewasa "tidak boleh" dimulai. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibrahim dan Ibnu Sirin. Pendapat mereka terbagi menjadi dua. Sebagian berpendapat bahwa pengampuan yang dilakukan sesudah dewasa sama sekali tidak boleh sama sekali, meskipun mereka tampak boros. Segolongan yang lain berpendapat, jika perilaku boros tersebut mereka bawa sejak masa kecil, maka pengampuan tetap berjalan, meskipun ketika menginjak dewasa mereka menampilkan kecerdikan. Tetapi jika kemudian keborosan itu terus berlangsung, maka mereka tidak diampui. Abu Hanifah memberikan batasan waktu bagi berakhirnya masa pengampuan, walaupun kebodohan mereka terus berlanjut pada usia 25 tahun.¹⁴

Safih Mahjur 'alaih (orang bodoh) yang dilarang membelanjakan hartanya) adalah seperti anak-anak yang sudah *tamyiz* dalam hukum membelanjakan harta yang dapat di-*fasakh* dan dibatalkan oleh senda gurau seperti akad jual beli. Adapun pembelanjaan yang tak dapat (mengandung) di-*fasakh* dan tidak dapat dibatalkan oleh senda gurau seperti akad nikah, talak

¹³*Ibid.*, hlm. 703.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 212.

dan membebaskan budak, maka tiada silang pendapat bahwa *tasharuf*-nya *safih* yang sudah baligh adalah lulus.¹⁵

Apabila *safih* menikah, maka sahlah akad nikahnya. Kemudian jika dia memberi mahar banyak, maka hanya lazim memakai mahar *mistsil* dan selebihnya dinyatakan batal. Jika dia mentalak isterinya, maka luluslah talaknya. Bila dia mentalaknya sebelum kumpul (jimak) maka wajib menyerahkan separoh dari *mahar musamma*. Bila dia memerdekakan budak maka sah pembebasannya, tetapi si bodoh wajib berusaha menebus harganya. Begitu pula dia wajib melaksanakan ibadah *maliah* seperti zakat. Hakim wajib menyerahkan harta zakat itu kepadanya agar dibagi-bagikan, karena zakat itu ibadah yang perlu adanya niat. Tetapi hakim mengutus seorang yang dapat dipercaya bersamanya agar dia tidak membagikan harta zakat tersebut kepada yang bukan tempat/mustahiqnya.¹⁶

Demikian pula ibadah haji, dia (*safih*) wajib melaksanakannya dan sah. Juga semua bentuk ibadah lainnya. Sedang anak-anak sekalipun ibadah-ibadah yang dia laksanakan itu sah, namun dia tidak wajib melakukannya.

Seorang *fasih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya bila dia punya ahli waris. Dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 215

¹⁶*Ibid.*

Sedang wasiat anak-anak, maka tidak diluluskan. Demikian juga bila dia menyampaikan pengakuan, bahwa dia bekerja menghasilkan harta baru setelah dia dalam pengampuan, meskipun pengampuannya belum dilepas. Karenanya bila dia mengaku punya hutang kepada orang lain setelah dia dalam pengampuan, kemudian ditengah-tengah pengampuan dia bekerja mendapatkan uang, maka orang yang berpiutang boleh mengambil pelunasan hutangnya dari harta anak-anak yang baru tadi, walaupun dia belum dilepas dari pengampuan.

Adapun *safih* yang dalam tengah-tengah pengampuan sebab sifat tololnya, maka pengakuannya tidak diperhatikan, baik pengakuan yang diucapkan sesudah pengampuan atau ditengah-tengah pengampuan, terhadap harta yang sudah ada pada saat pengampuan atau pun harta yang ia hasilkan sesudah pengampuan.¹⁷

C. *Istinbat Hukum Mazhab Hanafi*

Abu Hanifah memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam berijtihad secara terinci, tetapi kaidah-kaidah umum (*ushul kulliyah*) yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqhiyah tercermin dalam pernyataan, "Saya kembalikan segala persoalan pada Kitabullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah, saya merujuk pada Sunnah Nabi, dan apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah maupun Sunnah Nabi saw, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi, dan tidak beralih pada fatwa selain mereka. Apabila masalahnya sudah

¹⁷*Ibid.*, hlm. 216.

sampai kepada Ibrahim, Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin, Atha' dan Sa'id bin Musayyib (semuanya adalah tabi'ien), maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka berijtihad." ¹⁸

Dari sini dapat diketahui bahwa dasar-dasar *istidlal* yang digunakan Abu Hanifah adalah Al-Qur'an, Sunnah dan ijtihad dalam pengertian luas. Artinya, jika *nas* Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas-jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu disebut "diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah". Tetapi bila *nas* tadi menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, *illat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum disebut "melalui *qiyas*". Nash Al-Qur'an yang memerintahkan salat, misalnya, "Dirikanlah salat," dari perintah ini kita mengatakan bahwa hukum salat diambil dari *nas-nas* Al-Qur'an.

Tetapi larangan minum khamar yang memabukkan, sebagaimana firman-Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (المائدة: 90)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. (QS. al-Maidah: 90)". ¹⁹

Dalam ayat di atas hanya disebutkan khamar, tetapi karena '*illat* (kausa) diharamkannya khamar adalah sifatnya yang memabukkan, maka

¹⁸Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151.

¹⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1978, hlm. 176.

setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya. Penyimpulan semacam ini disebut *qiyas*. Dalam pembahasan berikutnya dapat ditegaskan bahwa teori *istihsan* yang banyak digunakan oleh Abu Hanifah bukanlah sesuatu yang keluar dari ketentuan *nas*. Dalam kutipan pernyataan di atas, Abu Hanifah tidak menyebutkan *qiyas* dan *istihsan* ke dalam dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam berijtihad, sebab yang ia maksudkan adalah dasar *naqliyah*, sementara *qiyas* dan *istihsan* hanya merupakan metode *istidlal aqliyah* dari dasar-dasar tadi.

Masalah ini dapat dipahami dari pernyataan Abu Hanifah bahwa ia tidak merujuk pada pendapat sahabat kecuali apabila tidak ditemukan hukumnya dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi. Demikian pula apabila tidak ditemukan dalam pendapat sahabat dan masalahnya sampai kepada *tabi'ien*, maka ia akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad. Dalam masalah ini sebenarnya belum ada perbedaan dengan para imam yang lain, Semua imam sepakat tentang keharusan merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Yang membedakan dasar-dasar pemikiran Abu Hanifah dengan para imam yang lain sebenarnya terletak pada kegemarannya menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyariatkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori *qiyas*, *istihsan*, *'urf* (adat-kebiasaan), teori kemaslahatan dan lainnya.²⁰

²⁰Syaikh Ahmad Farid, *op.cit.*, hlm. 182.

Perbedaan lebih tajam lagi bahwa Abu Hanifah banyak mempergunakan teori-teori tadi dan sangat ketat dalam penerimaan hadis ahad. Tidak seperti para imam yang lain, Abu Hanifah sering menafsirkan suatu *nas* dan membatasi konteks aplikasinya dalam kerangka '*illat*, hikmah, tujuan-tujuan moral dan bentuk kemaslahatan yang dipahaminya. Perlu segera ditambahkan di sini, betapa pun Abu Hanifah terkenal dengan Mazhab rasionalis yang acapkali menyelami dibalik arti dan '*illat* suatu hukum serta sering mempergunakan *qiyas*, tetapi itu tidak berarti ia telah mengabaikan *nas-nas* Al-Qur'an dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan *atsar*.²¹

Tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Abu Hanifah mendahulukan rasio daripada sunnah atau *atsar*. Bahkan jika ia menemukan pendapat atau *qaul* (pernyataan) sahabat yang benar, ia menolak untuk melakukan ijtihad. Dengan kata lain, pemikiran fiqih Abu Hanifah tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli hadis di Hijaz. Muhammad bin Hasan, seperti dikutip Abu Zahrah, membenarkan bahwa dalam masalah hukum seseorang yang melakukan hubungan dengan isterinya sebelum tawaf ziarah, Abu Hanifah mengambil pendapat Ibnu Abbas, seorang ulama ahli hadis Mekkah, dan menolak pendapat Ibrahim yang dikenal banyak mewariskan pemikiran fiqih rasional kepadanya.²²

Dalam Mazhab Abu Hanifah, *jima'* (hubungan suami-isteri) sebelum wuquf di Arafah membatalkan haji sedangkan sesudah wuquf tidak

²¹*Ibid.*, hlm. 182.

²²Syekh M. Hassan al-Jamal, *op.cit.*, hlm. 27.

membatalkan sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Satu bukti bahwa Abu Hanifah tidak mendahulukan pemikiran rasional di atas qaul sahabat yang dianggapnya benar. Abu Hanifah sendiri pernah mengatakan, "Tidak ada pemikiran yang benar tanpa riwayat dan tidak ada riwayat tanpa pemikiran."²³

Secara faktual, pemikiran fiqih Abu Hanifah memang sangat mendalam dan rasional. Ia memberi syarat yang cukup ketat dan selektif dalam penerimaan hadis ahad. Sikapnya ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukuhkan kebenaran periwayatan hadis. Apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hadis itu tidak dapat dijadikan dalil dari suatu hukum. Hal itu tidak dapat dikatakan bahwa Abu Hanifah meninggalkan Sunnah kecuali apabila secara jelas-jelas ia menolak Sunnah yang benar dari Nabi dan mendahulukan *qiyas* atau *istihsan*.²⁴

Bagi Abu Hanifah, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan hadis ahad. *Pertama*, orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan. *Kedua*, hadis ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum dan sering terjadi. Sebab kalau menyangkut persoalan umum dan sering terjadi, mestinya hadis itu diriwayatkan oleh banyak perawi, tidak seorang saja. Ketiga, hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar *kulliyah* (*mabad'i kulliyah*).²⁵

Selain persyaratan di atas, dalam banyak hal, Abu Hanifah lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh fuqaha daripada seorang ahli

²³Jamil Ahmad, *op.cit.*, hlm. 98.

²⁴Ahmad Asy Syurbasyi, *op.cit.*, hlm. 27.

²⁵Syekh M. Hassan al-Jamal, *op.cit.*, hlm. 27.

hadis. Kesalehan dan kejujuran saja belum cukup untuk dapat mengetahui seluk-beluk hadis, apalagi yang menyangkut hukum. Karenanya, Abu Hanifah lebih memprioritaskan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mengerti masalah-masalah fiqhiyah. Kondisi sosiologis dimana Abu Hanifah dibesarkan tentu mempengaruhi pula tata-cara berpikir Abu Hanifah. Irak adalah pusat kegiatan, kebudayaan dan peradaban yang banyak menengahkan masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya.

Dengan sikap selektif dalam penerimaan hadis ahad, Abu Hanifah dapat lebih leluasa melakukan penafsiran terhadap hadis-hadis shahih, menyelami tujuan-tujuan moral dan banyak mempergunakan rasio sehingga mampu memberi jawaban terhadap berbagai perkembangan yang muncul saat itu.

Husain Hamid Hasan berulang kali menegaskan bahwa *qiyas* dan *istihsan* Abu Hanifah tidak bertentangan dengan ketentuan nash-nash Al-Qur'an. Kalaupun Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa barangsiapa yang melakukan *istihsan* berarti mengada-adakan hukum, tetapi itu dimungkinkan karena Imam Syafi'i belum mempelajari secara mendalam teori *istihsan* yang dimaksudkan Imam Abu Hanifah. Sebab ternyata Syafi'i sendiri dalam persoalan tertentu mempergunakan teori ini. Bahkan disebutkan dalam bukunya, *Al-Umm*, ia memberi hukum dengan cara *istihsan*.²⁶

Contoh penggunaan teori *istihsan* seperti disabdakan oleh Nabi saw:

"Tidaklah seorang hakim mengadili (suatu perkara) dalam keadaan marah."

²⁶Tentang *istihsan* dapat dilihat dalam Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 79.

Nash ini secara literal melarang pelaksanaan pengadilan dalam keadaan marah, tetapi sebenarnya mengandung hal-hal yang lebih jauh. Misalnya, tidak boleh melakukan pengadilan ketika dalam keadaan takut, lapar atau karena pikiran tidak tenang. Sebab yang dapat dipahami dari nash tadi bukan "marahnya" tetapi "ketidaktenangan" pikiran sehingga seorang hakim tidak dapat menegakkan keadilan dari pengadilan tadi.

Dalam konteks ini, *istihsan* Abu Hanifah memang bukan sesuatu di luar ketentuan nash. Mengapa Abu Hanifah banyak melakukan ijtihad dan menggunakan rasio dalam menghadapi masalah-masalah fiqih? Sebagaimana telah dikemukakan di muka, Abu Hanifah bukan keturunan Arab. Ia keturunan Persia yang lahir di Kufah, Irak. Ia lahir dan dibesarkan di tempat yang jauh dari Hijaz, tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Para ahli fiqih di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti hadis dari *fuqaha*, bukan *muhadditsin*.

Sudah barang tentu Abu Hanifah dituntut untuk menyeleksi hadis yang sampai ke Kufah, atau minimal menyangsikan keshahihan hadis atau perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Dari situ ia cenderung memakai rasio dan ijtihad.

Farouq Abu Zaid menyebut beberapa faktor lain yang melatarbelakangi kecenderungan dan metode rasional Abu Hanifah. Penduduk Kufah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang

beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih diliputi oleh suasana kehidupan *hadawah* (sederhana), seperti keadaan pada masa Nabi. Untuk mengatasi berbagai masalah dalam kondisi seperti ini para ahli fiqih merasa cukup dengan hanya mengandalkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para sahabat. Karena itulah mereka tidak merasa perlu berijtihad seperti fuqaha Irak.

Faktor lain yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi seorang rasionalis ialah bahwa ia tidak hanya menggumuli ilmu-ilmu syari'at. Pada awal kehidupan ilmiahnya ia mempelajari ilmu kalam (teologi). kemudian belajar fiqih di Madrasah Kufah kepada Syeikh Hammad bin Sulaiman. Ia juga seorang pedagang kain yang menyebabkan ia mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perdagangan.

Studinya dalam ilmu kalam membuatnya terampil dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai persoalan fiqih. Ia pun piawai dalam mempraktekkan hukum-hukum Islam terutama dalam bidang perniagaan, melalui pendekatan *qiyas* dan *istihsannya*. Dari faktor-faktor di atas dapat pula dipahami mengapa Abu Hanifah sering melakukan kajian-kajian prediktif dalam masalah-masalah fiqih, menjaring kekuatan hukum secara sangat responsif dengan formula, teori dan karakteristik yang global sehingga memberi ruang gerak dinamis dalam Mazhabnya. Hal itu memang kita lihat dalam Mazhab Hanafi. Perbedaan pendapat dapat kita jumpai dalam hampir

semua persoalan antara Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan Zufar.²⁷

Apa yang diutarakan di atas merupakan *istinbat* hukum mazhab Hanafi dalam arti umum. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan wakaf bagi orang *safih* yaitu firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {5} وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 5-
(6)

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (*safih*) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah mengerti, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS.an-Nisa: 5-6).²⁸

Menurut Mazhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan larangan menyerahkan harta benda kepada orang *safih* karena apabila menyerahkan harta benda kepada orang *safih* maka orang semacam itu akan mempergunakan harta tersebut pada jalan yang tidak benar dan hanya bersifat pemborosan sehingga harta menjadi sia-sia. Larangan ini termasuk juga segala

²⁷Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm.91.

²⁸Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 115.

perbuatan hukum orang *safih* yang menyangkut harta benda. Akan tetapi ayat tersebut tidak melarang orang *safih* menggunakan hartanya sepanjang digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Jadi larangan tersebut adalah penyerahan harta kepada orang *safih* dan perbuatan orang *safih* menyerahkan harta kepada orang lain dengan catatan jika penggunaannya tidak benar.²⁹

Atas dasar itu dalam perspektif Mazhab Hanafi, jika orang *safih* menyerahkan harta benda atau menggunakan harta benda untuk sesuatu maksiat, maka perbuatan hukum tersebut dianggap batal, namun jika sebaliknya yaitu diperuntukkan pada jalan kebaikan, perbuatan hukum orang *safih* dalam penggunaan harta tersebut dianggap sah.

Dengan demikian dalam pandangan Mazhab Hanafi bahwa yang menjadi ukuran sah tidaknya orang *safih* melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta benda bukan terletak pada unsur, apakah sudah baligh, juga bukan pada unsur ia orang *safih* atau bukan melainkan terletak pada kemampuan orang *safih* mempergunakan harta itu, apakah untuk jalan kebaikan atau sebaliknya.

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 644

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG

WAKAF OLEH ORANG *SAFIH*

A. Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang *Safih*

Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, karena dia tidak dibebani kewajiban (bukan orang *mukallaf*), serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan perbuatannya. Selain itu mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Dengan demikian, anak kecil – baik yang sudah pintar atau belum – tidak boleh melakukan wakaf. Sedangkan walinya, tidak berhak pula melakukannya untuk mewakilinya. Demikian pula halnya dengan hakim. Dia tidak boleh mewakili anak tersebut atau memberinya izin untuk melakukan wakaf.¹

Menurut Muhammad Jawad Mughniah, sebagian ulama mazhab Imamiyah mengatakan: Wakaf yang dilakukan oleh anak yang telah berusia sepuluh tahun adalah sah. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperbolehkan wakaf orang *safih* (idiot) juga tidak sah, sebab wakaf termasuk kategori menggunakan harta, yang dilarang atas orang *safih*. Mazhab Hanafi mengatakan: Orang *safih* boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya, dengan syarat wasiat tersebut untuk sesuatu kebaikan, baik dalam bentuk

¹Muhammad Jawad Mughniah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 643.

wakaf maupun lainnya.²

Untuk memperkuat keterangannya, Muhammad Jawad Mughniyah menunjuk pembaca merujuk pada kitab karya Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Abdurrahmân al-Jazirî, dalam kitab tersebut mencantumkan pendapat mazhab Hanafi sebagai berikut :

ويصح أن يوصي السفية من ماله بالثلث إن كان له وارث بشرط أن يوصى
بالإنفاق على عمل خيري كالإنفاق على الفقراء والمساكين أو بناء مصح
أو قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك أما إذا أوصى بملعب أو ناد أو نحو ذلك فإن
وصيته تكون باطلة ولا تنفذ³

Artinya: "Seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya bila dia punya ahli waris. Dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus".

Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal.

²*Ibid.*, hlm. 644.

³Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz II, hlm. 291.

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis hendak menganalisis pendapat mazhab Hanafi tentang kebolehan seorang *safih* (idiot) yang dapat melakukan sesuatu dalam bentuk ibadah amaliah, yaitu seorang idiot dapat memberikan wakaf dengan sepertiga harta yang dimilikinya.

Para ulama mazhab, kecuali Abu Hanifah dan sebagian kecil ulama mazhab, sepakat bahwa orang *safih* harus dicegah dari membelanjakan hartanya. Keadaannya adalah seperti anak kecil dan orang gila, kecuali bila memang dalam membelanjakan hartanya itu dia memperoleh izin dari walinya. Akan tetapi dia memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak yang sedikit atau banyak, tidak berhubungan dengan masalah harta.⁴ Orang *safih* tidak akan lepas dari penahanan haknya itu, hingga dia menjadi dewasa dan mengerti, hal ini berdasar firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {5} وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 5-6)

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (*safih*) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah mengerti, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS.an-Nisa: 5-6)".⁵

Pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh Imamiyah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad dua orang pengikut Abu Hanifah.

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 688.

⁵Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 115.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa: Kedewasaan bukanlah merupakan persyaratan bagi penyerahan harta kepada pemiliknya, dan tidak pula bagi sahnya tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan harta-benda. Kalau seseorang mencapai usia baligh dan dia mengerti lalu mengalami ke-*safih*-an, maka tindakan-tindakannya dinyatakan sah, dan tidak dibenarkan menghalang-halangnya, bahkan seandainya usianya belum menginjak dua puluh lima tahun. Demikian pula halnya bila seseorang mencapai usia baligh tetapi dia belum mengerti (*safih*) di mana ke-*safih*-annya itu merupakan kelanjutan dari masa kecilnya dalam keadaan seperti ini, ketika dia berumur dua puluh lima tahun, dia tidak boleh lagi.⁶

Pendapat ini secara jelas berbeda dengan ijma' umat secara keseluruhan, bahkan dengan apa yang selama ini dikenal sebagai sesuatu kemestian dalam agama, dan *nas* Quran, yaitu, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (*safih*) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)..."

Untuk lebih memperjelas wakaf bagi orang *safih*, maka posisi orang ini dalam kitab fikih dapat diketahui dalam pembahasan bab *al-hijr* (pengampuan, pembatasan, larangan menggunakan harta).⁷ Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dari segi penyebab seseorang ditetapkan berada

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 689.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 210.

dalam *al-hijr*, maka terdapat beberapa akibat hukum yang terkait dengan orang-orang yang berada di bawah *al-hijr*, yaitu:⁸

- a. **Akibat *al-hijr*** terhadap anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum. Dalam membahas hukum tindakan anak kecil, ulama Hanafiyah dan Malikiyah membedakan anak yang belum *mumayyiz* (menurut mereka belum mencapai umur tujuh tahun) dengan anak yang sudah *mumayyiz* (yang berumur tujuh tahun ke atas). Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membedakan anak yang *mumayyiz* dengan anak yang belum *mumayyiz*. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, perbedaan ini penting dilakukan karena Rasulullah sendiri dalam sebuah sabda beliau mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ الْمَعْنَى حَدَّثَنَا سَوَّارُ أَبُو حَمْزَةَ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ (رواه أحمد)⁹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdur Rahman ath-Thufariy dan Abdullah bin Bakr al-Sahmiy al-Ma'na dari Sawwar Abu Hamzah dari Amri bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: Suruh anakmu shalat, apabila mereka telah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika umur sepuluh tahun". (HR Ahmad).

⁸*Al-hijru* adalah larangan bagi seseorang untuk mengelola kekayaannya karena masih kecil, atau gila, atau akalnya tidak sempurna, atau bangkrut. Lihat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 337.

⁹Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 345 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Dengan demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa anak yang berumur tujuh tahun termasuk ke dalam kategori *mumayyiz*, dan dalam hukum-hukum tertentu mereka telah dituntut untuk melaksanakannya. Perbuatan hukum anak itu boleh dibedakan antara tindakan yang bersifat perbuatan dan tindakan yang bersifat perkataan.

Para ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliah) menyatakan bahwa mengenai tindakan hukum anak yang bersifat perbuatan, seperti merusak barang orang lain, maka statusnya sebagai orang yang dalam pengampuan tidak berlaku, karena pengampuan itu hanya tertuju kepada perkataan, bukan pada perbuatan. Oleh sebab itu, setiap barang atau jiwa yang dirusak atau dihilangkan anak kecil, wajib diganti atau dibayar dendanya. Lain halnya apabila tindakan hukum itu bersifat perkataan atau pernyataan.¹⁰

Jika tindakan hukum itu dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perkataan atau pernyataannya itu dianggap batal, meskipun tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya, karena ia dinilai belum cakap melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukan oleh anak *mumayyiz*, maka, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan merugikan, atau antara menguntungkan dan merugikan dirinya.¹¹

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 205.

¹¹*Ibid*

Apabila tindakan itu menguntungkan dirinya, seperti menerima sedekah atau wasiat, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tindakannya sah, tanpa harus ada persetujuan dari walinya. Apabila tindakannya itu merugikan dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa tindakan itu dianggap tidak sah dan persetujuan dari wali pun tidak berlaku, karena tidak dibenarkan adanya justifikasi dalam hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, ulama Hanabilah mengecualikan hukum tindakan anak *mumayyiz* yang merugikan itu. Menurut mereka, apabila wali anak itu mengizinkan tindakan itu, maka hukumnya sah. Apabila tindakan anak *mumayyiz* ini bersitat antara menguntungkan dan merugikan bagi dirinya, seperti jual beli dan sewa menyewa, maka ulama Hanafiyah dan Malikiyah menganggap tindakan hukum itu sah apabila diizinkan walinya. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tindakan hukum anak kecil (yang bersifat spekulasi), baik *mumayyiz* maupun belum, tidak sah.¹²

Mazhab Hanbali menganggap sah tindakan anak yang telah *mumayyiz* (yang tidak bersifat spekulasi), apabila diizinkan walinya.¹³ Akibat hukum lain dari pengampuan anak kecil ini adalah bahwa para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa harta anak kecil itu tidak boleh diserahkan kepada mereka, karena Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6 menyatakan:

¹²*Ibid*, hlm. 205.

¹³Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 211.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 6)

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS. an-Nisa: 6).¹⁴

Menurut ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah), ayat ini menjelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak kecil itu apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu cukup umur (baligh) dan cerdas. Sebelum kedua syarat itu terpenuhi, maka wali tidak boleh menyerahkan harta anak itu kepadanya. Untuk menyatakan anak itu telah baligh atau belum, para ulama fiqh mengatakan boleh dilihat dari beberapa indikasi, seperti dari segi umur atau dari segi tanda-tanda biologisnya, seperti mimpi, haid dan hamil. Sedangkan untuk menilai anak itu apakah sudah cerdas atau belum, menurut jumhur ulama, harus senantiasa diuji dalam membelanjakan hartanya.¹⁵

Apabila ia telah terampil mengelola hartanya sendiri, dalam artian tidak merugikan dirinya lagi, maka ia dianggap telah cerdas. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran itu adalah keterampilan dalam mengelola harta dan komitmennya terhadap agamanya. Apabila ternyata anak itu telah baligh dan cerdas, sesuai dengan kriteria baligh dan cerdas yang dikemukakan para ulama di atas, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status di bawah pengampuannya hilang dengan

¹⁴Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 116.

¹⁵Nasrun Haroen, *op.cit.*, hlm. 206.

sendirinya, tanpa harus ditetapkan hakim; karena penetapan mereka di bawah pengampuan bukan melalui ketetapan hakim, maka pencabutan *al-hijr* bagi mereka pun tidak perlu melalui ketetapan hakim. Akan tetapi, satu riwayat dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perlu adanya ketetapan hakim.¹⁶

Apabila anak itu belum memenuhi dua syarat di atas, maka wali anak itu tidak boleh menyerahkan harta itu kepada anak itu dan yang bertindak sebagai pengelola dan pemelihara harta itu adalah walinya dan pengelolaan terhadap harta itu harus senantiasa bertitik tolak pada kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, dalam memelihara atau mengelola harta itu seorang wali harus waspada. Apabila wali itu orang kaya, maka ia tidak boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu. Akan tetapi, bila wali itu orang miskin, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wali boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu, sesuai dengan keperluan sehari-hari.

- b. Akibat *al-hijr* terhadap orang gila.** Para ulama fiqh membedakan hukum orang gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dengan gila yang kambuh pada waktu-waktu tertentu saja, dalam artian, suatu saat ia gila dan pada saat lainnya ia sembuh. Orang gila bentuk pertama, disamakan dengan orang yang tidak berakal sama sekali. Oleh sebab itu, tindakan hukum mereka sama dengan tindakan hukum anak kecil yang belum *mumayyiz*. Seluruh tindakan hukum yang mereka lakukan yang

¹⁶*Ibid.*, hlm. 206.

sifatnya merugikan diri mereka sendiri, seperti talak, hibah, dan wakaf, dianggap batal. Adapun orang gila dalam bentuk kedua, apabila ia melakukan tindakan hukum ketika gila kambuh, maka tindakan hukumnya dianggap tidak sah; wakaf, hibah, dan sedekahnya dibatalkan.¹⁷

Akan tetapi, apabila tindakan itu dilakukannya pada waktu gila tidak kambuh, maka tindakannya dianggap sah karena ketika itu ia terbebas dari ikatan pengampuannya. Apabila ia menceraikan isterinya, misalnya maka cerainya itu berlaku sah.

Akibat *al-hijr* terhadap orang bodoh/dungu (*safih*). Para ulama fiqh menyatakan bahwa termasuk kepada *safih* (orang bodoh dan dungu) adalah orang yang kebiasaannya menghambur-hamburkan hartanya tanpa tujuan yang diridai syara', seperti membelanjakan hartanya untuk membeli khamar, untuk berjudi, atau pedagang yang tidak mengerti cara berdagang sehingga sering ditipu orang, atau orang yang menghambur-hamburkan hartanya untuk kepuasan nafsu seksualnya. Orang-orang seperti ini, demi kemaslahatan hartanya, menurut jumhur ulama, harus dikenakan hukum *al-hijr*, melalui ketetapan hakim. Seluruh tindakan hukum yang bersifat merugikan dirinya dianggap batal, seperti wakaf, sedekah dan hibah. Akan tetapi, tindakan hukum, seperti jual beli, nikah dan talak, untuk sah atau tidaknya tergantung kepada penetapan hakim. Apabila hakim melihat bahwa dalam tindakan hukum yang dilakukan itu terkandung kemaslahatan untuk dirinya, maka hakim boleh mengizinkannya. Akan tetapi, apabila mengandung kerugian,

¹⁷Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 211.

hakim berhak membatalkan jual beli atau nikah itu. Di kalangan ulama Hanafiyah terjadi perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila orang bodoh itu telah balig dan berakal, maka tindakan hukumnya dianggap sah, sekalipun merugikan dirinya sendiri, karena untuk penetapan mereka di bawah pengampuan merupakan pengekangan terhadap hak asasi mereka.¹⁸

Menurut penulis, orang *safih* sebaiknya dibolehkan menerima harta benda dan dibolehkan pula menyerahkan harta benda sepanjang penggunaan harta itu bermanfaat bagi orang lain dan umum. Atas dasar itu, penulis mendukung pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan orang *safih* mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis.

Menurut penulis, setiap orang yang membelanjakan harta pada jalan kebaikan, maka tidak ada larangan untuk melakukannya. Siapa pun orangnya terlepas apakah orang itu bodoh/dungu atau cerdas/pintar, yang penting harta itu diperuntukkan kebaikan. Sekalipun tidak *safih*, namun jika digunakan untuk hal yang tidak baik maka apalah artinya pintar dan cerdas itu kalau pada akhirnya merugikan dirinya sendiri dan bahkan mungkin orang lain. Sedangkan sebabnya orang *safih* tidak boleh melakukan perbuatan hukum

¹⁸*Ibid.*, hlm. 212.

yang menyangkut harta benda adalah karena menurut perkiraan para ahli bahwa orang *safih* sangat berkecenderungan menyalahgunakan harta yang intinya pemborosan atau menyia-nyiakan harta. Jika alasannya karena itu, maka apabila sebaliknya yaitu penggunaannya jelas, terarah dan berdampak mendatangkan kebaikan maka hal itu adalah sah dan tidak terlarang.

B. *Istinbat* Hukum Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang *Safih*

Dalil hukum Mazhab Hanafi yang berkaitan dengan wakaf bagi orang *safih* yaitu:

1. Sumber/dalil pokok yaitu firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6
2. Dalil pendukung/*istinbat* hukum yaitu *qiyas*.¹⁹

Pertama, sumber/dalil pokok yaitu firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6 berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {5} وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (النساء: 5-6)

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (*safih*) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut

¹⁹Menurut Satria Effendi M. Zein, al-Qur'an dan Sunnah disebut sumber/dalil-dalil pokok, sedangkan selain keduanya, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* disebut dalil pendukung, karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*. Imam al-Ghazali misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode *istinbat*. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 77.

pendapatmu mereka telah mengerti, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS.an-Nisa: 5-6).²⁰

Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam *Tafsîr al-Marâgî* menjelaskan:

Kata السُّفَهَا (As-Sufaha), bentuk tunggalnya *safih*, artinya orang yang menyia-nyiakan harta dengan menginfakkannya kepada hal-hal yang tidak semestinya dibeli (dikonsumsi). Asal katanya *as-safah*, artinya ringan dan goncang. Berdasarkan pengertian itu, dikatakan *zamanun safih*, apabila dalam zaman tersebut banyak kegoncangan yang terjadi. Kemudian dikatakan *saubun safih*, artinya pakaian yang jelek tenunannya. Kemudian kata itu dipakai untuk pengertian kurangnya kecerdasan akal di dalam mengatur (*me-manage*) harta, dan makna inilah yang dimaksud di dalam ayat ini.²¹

Terhadap ayat di atas, Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan *tasarruf* (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lainnya.²²

Berangkat dari pengertian ini, Ibnu Kasir menyimpulkan, orang-orang yang kurang sempurna akalnya dikenakan *hijr* (larangan) yaitu tidak boleh men-*tasarruf*-kan hartanya). Mereka yang di *hijr* ini ada beberapa macam; adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda, sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam mu'amalah).

²⁰Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 115.

²¹Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Juz IV, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M, hlm. 332.

²²Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978, hlm. 447.

Keterangan Ibnu Kasîr tersebut menyangkut persoalan orang yang telah dianggap mampu bertindak dalam hukum dan oleh karenanya segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Persoalan ini dikenal dengan istilah *mukallaf*.²³

Kedua, Dalil pendukung/*istinbat* hukum yaitu *qiyas*.

Dalam perspektif mazhab Hanafi bahwa manakala seorang *safih* mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang diwakafkan tidak melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Maka perbuatan orang *safih* itu diqiyaskan sebagai mukallaf yang cerdas/pintar dan tidak pemboros. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kebaikan maka dalam peristiwa tersebut, unsur *idiotnya* menjadi hilang, namun demikian hal itu hanya berlaku dalam peristiwa itu. Dalam peristiwa lain tergantung apakah perbuatannya termasuk kriteria *idiot* atau tidak. Dengan demikian hilangnya unsur *idiot* itu tidak bersifat permanen, melainkan tergantung dari peristiwa hukum yang dia lakukan.

Di dalam terminologi hukum Islam, istilah *mukallaf* disebut juga *al mahkum alaih* (subyek hukum). Orang *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak dalam hukum dan oleh karenanya segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Pada prinsipnya

²³*Ibid.*, hlm. 447.

seseorang belum dikenakan pembebanan hukum (*taklif*) sebelum ia cakap bertindak dalam hukum. Para ulama ahli hukum Islam mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum bagi manusia adalah adanya (1) kecakapan bertindak dan (2) pemahaman yang memadai melalui akal sehat. Dua unsur ini sifatnya mutlak dan satu dengan lainnya harus selalu ada, oleh karena itu orang gila, anak kecil, orang tidur, orang mabuk, orang lupa, dan yang sejenisnya segala tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.²⁴

Seseorang yang cakap bertindak dalam hukum disebut *al ahliyah*. Dalam pengertian yang lain, *al ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak dalam hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.. Oleh karena itu anak kecil yang belum baligh, orang yang berada di bawah pengampuan (*al-hijr*) dianggap tidak cakap.²⁵

Konsepsi *ahliyah* ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *ahliyah al ada* dan *ahliyah al wujub*. *Ahliyah al ada* adalah sifat kecakapan bertindak dalam hukum oleh seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang menjadi ukuran dalam *ahliyah al ada* ini adalah *`aqil*

²⁴Ismail Muhamamad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 144-145

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 32

baligh dan berakal sempurna. Sedangkan *ahliyah al wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan ia belum cakap untuk dibebani kewajiban hukum. Ia hanya dianggap mampu untuk menerima hak-hak dan tidak dituntut adanya kewajiban hukum atas dirinya.²⁶

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa penentuan kecakapan atau tidaknya seseorang dalam hukum bergantung pada akalanya. Akal seseorang secara biologis bisa mengalami perubahan baik berkurang bahkan hilang kemampuannya sama sekali. Dalam kaitan ini kecakapan bertindak dalam hukum seseorang bisa berubah disebabkan oleh (1) *al `awarid al samawiyyah* (halangan yang bersifat alamiyah datangnya dari Tuhan) seperti gila, dungu, sakit tua yang berlanjut pada kematian, dan yang sejenisnya dan (2) *al `awarid al muktasabah* (halangan yang disebabkan oleh tindakan manusia sendiri) seperti mabuk, dipaksa, tersalah (*khata`*), dan yang sejenisnya.²⁷

Dalam implementasinya, halangan terhadap *ahliyah al ada* diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu *pertama* menghilangkan kecakapan seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur dan lupa. *Kedua*, mengurangi kecakapan seseorang atas hukum sehingga sifat kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang dungu. *Ketiga*, halangan yang sifatnya mengubah sebagian kemampuan bertindak secara hukum seperti orang yang *failit*, di bawah pengampuan, dan lain-lain.

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 327.

²⁷TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 501

Menurut Mazhab Hanafi ayat tersebut menunjukkan larangan menyerahkan harta benda kepada orang *safih* karena apabila menyerahkan harta benda kepada orang *safih* maka orang semacam itu akan mempergunakan harta tersebut pada jalan yang tidak benar dan hanya bersifat pemborosan sehingga harta menjadi sia-sia. Larangan ini termasuk juga segala perbuatan hukum orang *safih* yang menyangkut harta benda. Akan tetapi ayat tersebut tidak melarang orang *safih* menggunakan hartanya sepanjang digunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Jadi larangan tersebut adalah penyerahan harta kepada orang *safih* dan perbuatan orang *safih* menyerahkan harta kepada orang lain dengan catatan jika penggunaannya tidak benar.

Atas dasar itu dalam perspektif Mazhab Hanafi, jika orang *safih* menyerahkan harta benda atau menggunakan harta benda untuk sesuatu maksiat, maka perbuatan hukum tersebut dianggap batal, namun jika sebaliknya yaitu diperuntukkan pada jalan kebaikan, perbuatan hukum orang *safih* dalam penggunaan harta tersebut dianggap sah.

Dengan demikian dalam pandangan Mazhab Hanafi bahwa yang menjadi ukuran sah tidaknya orang *safih* melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta benda bukan terletak pada unsur, apakah sudah baligh, juga bukan pada unsur ia orang *safih* atau bukan melainkan terletak pada kemampuan orang *safih* mempergunakan harta itu yaitu apakah untuk jalan kebaikan atau sebaliknya.

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli usul fikih dari Mesir) mengatakan bahwa dalam menyusun mazhabnya, Imam Abu Hanifah pertama-tama merujuk kepada Al-Qur'an, selanjutnya kepada sunnah Nabi Saw. Jika dalam kedua sumber tersebut tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang pada ijma' sahabat. Namun jika para sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada di kalangan mereka. Imam Abu Hanifah tidak terikat dengan pendapat para tabi'in karena mereka sama-sama mampu untuk berijtihad. Artinya, bila hukum suatu masalah tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka Imam Abu Hanifah melakukan ijtihad.²⁸

Sama halnya dengan mazhab-mazhab fikih lain, bagi Imam Abu Hanifah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw secara berurutan adalah sumber pertama dan kedua dalam pembentukan mazhabnya. Namun untuk menerima suatu hadis sebagai penafsir Al-Qur'an, ia melakukan seleksi yang lebih ketat sehingga hadis yang dapat diterimanya sebagai sumber hukum relatif lebih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadis yang diterima, peranan ijtihad menjadi lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak yang lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan tempat lain, misalnya di Madinah atau Mekah.²⁹

Seleksi yang ketat dalam menerima hadis itu antara lain terlihat dalam hal penerimaan hadis ahad. Selain syarat-syarat yang disepakati, Imam Abu

²⁸Meskipun Imam Abu Hanifah termasuk salah seorang ulama yang banyak melakukan ijtihad, namun hal itu didasarkan pada pertimbangan yang matang.

²⁹Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 512.

Hanifah juga mensyaratkan bahwa isi hadis yang diriwayatkan itu tidak menyalahi apa yang dipraktekkan perawi itu sendiri. Oleh sebab itu, ia misalnya menolak hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Bersihkanlah bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat anjing dengan tujuh kali basuhan, dan basuhan pertamanya dengan tanah". (HR. Muslim). Hadis ini ditolaknya karena dalam praktek Abu Hurairah sebagai perawi hadis itu hanya membasuh bejananya sebanyak tiga kali. Hal itu menurutnya, menunjukkan ketidakbenaran hadis tersebut,

Contoh lain terlihat dari pendapatnya bahwa hadis dapat digunakan untuk *mentakhsis* (mengeluarkan sebagian dari keseluruhan) lafal umum dalam Al-Qur'an hanya hadis *mutawatir* atau hadis *masyhur*. Hadis ahad tidak dapat digunakan untuk *mentakhsis* lafal umum dalam Al-Qur'an. Alasannya lafal umum dalam Al-Qur'an adalah *qat'i ad-dalalah* (pasti/tegas petunjuknya). Sedangkan pada hadis ahad meskipun *dalalah*-nya (penunjukkannya terhadap hukum) bersifat *qat'i* (pasti), seperti dalam lafal *khas* (lafal yang menunjukkan satu pengertian atau beberapa pengertian secara terbatas), namun penyampaian dari Rasulullah Saw adalah *zanni* (tidak pasti). Sesuatu yang *zanni* tidak kuat untuk *mentakhsis* yang *qat'i*.

Pendapatnya ini berpengaruh banyak terhadap pembentukan mazhabnya. Imam Abu Hanifah berpegang erat dengan fatwa sahabat, baik yang disepakati (*ijma'* sahabat) maupun yang diperdebatkan. Disamping berpegang pada *ijma'* sahabat, Imam Abu Hanifah juga berpegang pada *ijma'*

para mujtahid. Menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, dalam melakukan ijtihad Imam Abu Hanifah tidak akan keluar dari kesepakatan para mujtahid yang mendahuluinya di Kufah. Jika hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber tersebut, maka pendekatan yang dilakukannya dengan jalan meneliti tujuan hukum.³⁰

Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat jeli dalam melihat tujuan atau inti dari suatu rumusan hukum. Lewat tujuan hukum ini, hukum dikembangkannya dengan berbagai metode ijtihad. Di antara sekian banyak metode ijtihad yang digunakan Imam Abu Hanifah dan yang paling berpengaruh kepada mazhab fikihnya adalah *qiyas*, *istihsan*, *urf*, dan *hiyal syar'iyah* (*Hilah*).

Jika yang akan dicari hukumnya memiliki persamaan pada inti permasalahan atau *ilath*-nya dengan yang disebut dalam *nas* (Al-Qur'an dan atau sunnah Nabi Saw), maka hukumnya dapat disamakan. Cara penetapan hukum seperti ini dikenal dengan metode *qiyas* (analogi). Imam Abu Hanifah terkenal banyak menggunakan *qiyas* dalam menjawab masalah-masalah baru yang banyak muncul di Irak. Namun demikian, jika hasil *qiyas* itu dalam satu kondisi dipandang bertentangan dengan kepentingan lain yang menurut kebiasaan syariat lebih utama untuk dipertahankan, maka ia meninggalkan hasil *qiyas* tersebut dan mencari dalil hukum lain yang lebih sesuai. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai tokoh metode *istihsan*. Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menjelaskan bahwa

³⁰Tujuan hukum menjadi pertimbangan dan karakteristik kepiawayan Imam Abu Hanifah.

murid-murid Imam Abu Hanifah sering mengemukakan debat terhadap kesimpulan-kesimpulan *qiyas*nya. Namun bilamana sang guru itu mengatakan bahwa ia melandaskan fatwanya pada *istihsan*, murid-muridnya terdiam.

Selain itu Imam Abu Hanifah juga berpegang kepada adat istiadat (*'urf*) yang positif dalam membentuk mazhabnya. Menurutnya, ketentuan yang telah mapan dalam masyarakat dapat dikukuhkan sebagai hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. Prinsip ini banyak berpengaruh dalam membentuk mazhab fikihnya terutama dalam bidang muamalah. Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga menggunakan *hilah syar'iyah* dalam berbagai fatwanya. *Hilah (al-hiyal)* yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah suatu jalan yang dilalui sebagai upaya untuk keluar dari suatu kesempitan dengan cara yang menurutnya diakui oleh syarak.

Imam Abu Hanifah, seperti dikemukakan oleh Manna al-Qattan (ahli fikih Mesir), sering menggunakan *hilah* terutama dalam masalah sumpah dan taklik talak. Misalnya, seorang laki-laki bersumpah untuk mencampuri isterinya di siang hari bulan Ramadan. Sebagai jalan keluarnya. Imam Abu Hanifah melakukan *hilah* dengan menfatwakan agar laki-laki itu membawa isterinya mengadakan perjalanan. Dalam keadaan musafir laki-laki tersebut secara halal boleh mencampuri isterinya di siang hari Ramadan, sehingga ia dapat memenuhi sumpahnya. Menurut hukum Islam, orang yang sedang dalam perjalanan memiliki *rukhsah* (keringanan) untuk tidak berpuasa.³¹

³¹ *Rukhsah* (keringanan) merupakan salah satu keluwesan hukum Islam.

Dalam konteksnya dengan tema skripsi ini, bahwa *istinbat* hukum yang digunakan mazhab Hanafi dalam kaitannya tentang wakaf bagi orang *safih* yaitu *qiyas*. Untuk lebih jelasnya, dalam perspektif mazhab Hanafi bahwa manakala seorang *safih* boleh mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang diwakafkan tidak melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis.

Perbuatan orang *safih* seperti itu dapat diqiyaskan sebagai mukallaf yang cerdas/pintar dan tidak pemboros. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kebaikan maka dalam peristiwa tersebut, unsur *idiotnya* menjadi hilang, namun demikian hal itu hanya berlaku dalam peristiwa itu. Dalam peristiwa lain tergantung apakah perbuatannya termasuk kriteria *idiot* atau tidak. Dengan demikian hilangnya unsur *idiot* itu tidak bersifat permanen, melainkan tergantung dari peristiwa hukum yang dia lakukan. Perlu ditegaskan bahwa *idiot* itu berbeda dengan *safih*. Perbedaannya yaitu *idiot* hanya merupakan salah satu unsur disebutnya orang itu *safih*. Dengan demikian *safih* lebih luas dari pengertian *idiot* karena *safih* meliputi orang yang *idiot* dan pemboros.

Sebetulnya hilangnya kemampuan dan kecakapan hukum seorang *safih* bukan terletak pada *idiot* subjeknya, melainkan lebih terfokus pada aspek perbuatannya yang dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum yang kurang lebih identik dengan tindakan anak di bawah umur. Perbuatan orang

safih dianggap tidak sah manakala tidak mengandung unsur manfaat bagi dirinya terlebih lagi orang lain. Akan tetapi sebaliknya, jika perbuatannya mengandung manfaat bagi dirinya maupun orang lain maka nilai *kesafihannya* hilang. Akan tetapi semua ini sangat tergantung pada perbuatannya. Karena itu nilai keabsahan perbuatan hukum orang *safih* lebih terpusat pada akibat dari perbuatannya bukan pada orangnya. Hal ini berarti secara otomatis sangat bersifat temporer dan menjadi relatif. Oleh karena itu dapat dimengerti jika mazhab Hanafi mengqiyaskan orang *safih* menjadi mukallaf yang berhak dengan berpijak pada perbuatannya yang mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, seorang *safih* sah mewasiatkan 1/3 dari hartanya apabila dia punya ahli waris. Keabsahan tersebut dengan syarat dia berwasiat agar dipergunakan dalam berbagai hal kebaikan seperti untuk memberi nafkah fakir miskin, untuk membangun sanatorium, jembatan, masjid dan lain sebagainya. Akan halnya bila dia berwasiat untuk tempat permainan, club dan lain sebagainya, maka wasiatnya batal; tidak lulus". Pendapat mazhab Hanafi tersebut mengisyaratkan, seorang *safih* dibolehkan mewakafkan hartanya dengan ketentuan: *pertama*, benda yang hendak diwakafkan tidak boleh melebihi dari satu pertiga keseluruhan harta yang dimiliki; *kedua*, benda yang diwakafkan itu dimaksudkan untuk hal-hal yang sifatnya mendatangkan kebaikan yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apabila orang *safih* mewakafkan harta diperuntukkan bagi jalan kemaksiatan maka wakafnya batal.
2. Secara umum dapat diterangkan bahwa dasar *istinbat* hukum mazhab Hanafi adalah (1) al-Qur'an; (2) Sunnah Rasulullah; (3) Fatwa-fatwa dari para sahabat; (4) Istihsan; (5) Ijma'; (6) Urf. Sedangkan *istinbat* hukum secara khusus yang berkaitan dengan wakaf bagi orang *safih* adalah (a)

Sumber/dalil pokok yakni firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6. (b) *Qiyas*.

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Mazhab Hanafi berbeda dengan ulama lainnya, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamil, *Hundred Great Muslim*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, "Seratus Muslim Terkemuka", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi, (Dinul Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Anshary, Abi Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm.*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978.
- Effendi, Saekan Erniati, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Farid, Syaikh Ahmad, Min A'lam As-Salaf, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, *"60 Biografi Ulama Salaf"*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.

- Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.
- Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- HAM, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.
- Haq, Faishal dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hasan, Husain Hamid, *Al-Madhkal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Fikr, 1981.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Jamal, Syekh M. Hassan, *Hayatu al-A'Immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Jay, Muhammad Rawais Qal'ah, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn al-Khattab*, Beirut: Dar al-Nafais, 1409 H/1989 M
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Jilid II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Malibary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth.

- Marâgî, Ahmad Mustafâ, *Tafsîr al-Marâgî*, Juz IV, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M.
- Marwazi, Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani hadis No. 345 dalam CD program Mawsu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, Juz III.
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, "Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi", Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Shiddieqy, TM.Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Syaltut, Mahmud, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, "Fiqih Tujuh Madzhab", Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syurbasyi, Ahmad Asy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Harvarindo, 2005.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978.
- Zahrah, Abu, Abu Hanifah, *Hayatuhu, Wa Asrahu, Wa Ara-uhi*, Mesir: Dar Fikr, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zaid, Farouq Abu, *Hukum Islam, antara Tradisionalis dan Modernis*, Jakarta: P3M, tth
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam: Jilid III*, Jakarta: Rajawali, 1988.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Zen

Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 05 Oktober 1981

Alamat Asal : Desa Kedungjati RT 02 RW 01 Jatisari Kebumen
54351

Pendidikan : - SDN Jatisari II Kebumen lulus th. 1994
- SMPN 01 Kebumen lulus th. 1997
- SMU A. Wahid Hasyim Jombang lulus th. 2000
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2001

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lukman Zen